



Buletin Parlementaria

Nomor 1178/V/XI/2021 • November 2021

Jelang MotoGP 2022, Fasilitas Sirkuit Mandalika Perlu Terus Ditingkatkan



3 Rampas Penghidupan
Orang, Puan
Maharani Minta Mafia
Tanah Diberantas



5 Rachmat Gobel
Berharap Pemerintah
Perpanjang Program
Diskon PPnBM



9 772614 339005



BULETIN

Jelang MotoGP 2022, Fasilitas Sirkuit Mandalika Perlu Terus Ditingkatkan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai kualitas trek dan fasilitas infrastruktur Pertamina Mandalika International Street Circuit, di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah sangat layak menjadi tuan rumah gelaran internasional. Diharapkan ke depannya Sirkuit Mandalika tetap dirawat dengan baik oleh pengelolanya, sehingga siap menyelenggarakan event besar sekelas MotoGP pada 20 Maret 2022 mendatang. Namun untuk menjamu pembalap dan tim MotoGP, fasilitas maupun sarana pendukung lainnya bisa ditingkatkan.

Dede mengungkapkan hal tersebut usai memimpin Tim Kunspek Komisi X DPR RI meninjau Sirkuit Mandalika, di Lombok Tengah, NTB, Senin (22/11). Turut mendampingi, Wakil Bupati Lombok Tengah Muhammad Nursiyah, Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Arie Prasetyo, Direktur Teknik dan SDM ITDC Taufik Hidayat, Deputi Bidang Produk dan Penyelenggaraan Kegiatan Kemenparekraf Rizki Handayani, dan Direktur Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf Idra Ni Tua.

“Contohnya (fasilitas yang bisa ditingkatkan), jumlah tribun penonton saat ini baru ada enam, yang hanya bisa menampung kapasitas sekitar 20 ribu orang. Diharapkan untuk event besar selanjutnya (tribun penonton) bisa bertambah lebih banyak lagi. Peralannya untuk event sebesar (MotoGP) itu, kemungkinan besar jumlah penonton diprediksi sekitar dua ratusan ribu orang.



Komisi X DPR RI bertukar cenderamata dengan Wabup Lombok Tengah usai meninjau Sirkuit Mandalika. Foto: Runi/nvl

Untuk itu pihak pengelola dan panitia penyelenggara bisa berkoordinasi untuk peningkatan fasilitas,” ungkap politisi Partai Demokrat itu.

Di sisi lain, Dede menambahkan, bahwasanya harus dipahami *event-event* yang diselenggarakan di Sirkuit Mandalika, baik itu World Superbike (WSBK) hingga MotoGP merupakan daya tarik bagi masyarakat menengah ke atas, sehingga tiket nonton yang dijual bisa terbilang cukup mahal. Maka dari itu, Dede menginginkan ke depannya, harus ada event ataupun daya tarik lainnya di sekitar sirkuit yang sifatnya *middle to low*.

“Contohnya, saya menawarkan ada pembangunan seperti destinasi wahana Dunia Fantasi yang menggunakan tematiknya adalah Mandalika,

mengusung tema *bike world* (dunia motor). Tinggal ciptakan saja, contoh *roller coaster* bisa dibuat modelnya seperti motor Ducati, atau lainnya. Kemudian pantai yang begitu indah bisa jadi *water sport tourism*, serta bisa menciptakan museum motor,” ungkap legislator dapil Jawa Barat II itu.

Dengan hadirnya beberapa destinasi wisata itu, kata Dede, dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menikmati event. Terlebih dengan hadirnya destinasi wisata lainnya yang bisa setiap waktu dikunjungi wisatawan di kawasan Mandalika.

“Dan itu yang harus dipikirkan pemerintah daerah ke depan untuk membuat poin-poin menarik selain Mandalika, untuk memulihkan roda perekonomian NTB,” pesan Dede. ■ rni/sf

Rampas Penghidupan Orang, Puan Maharani Minta Mafia Tanah Diberantas

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyoroti maraknya kasus mafia tanah yang sangat merugikan masyarakat belakangan ini. Ia meminta pemerintah bersama jajaran penegak hukum memberantas aksi-aksi mafia tanah. Puan meyakini, kasus perampasan aset tanah yang dialami artis Nirina Zubir hanyalah salah satu contoh kasus mafia tanah yang banyak dialami warga masyarakat.

“Kasus Nirina Zubir harus menjadi momentum pemberantasan mafia tanah sampai akar-akarnya. Tanah adalah sumber penghidupan. Mereka yang merampas tanah adalah perampas penghidupan orang. Harus diberantas!” kata Puan melalui rilis yang diterima **Parlementaria**, Jumat (19/11).

Puan menekankan, jaringan mafia tanah harus bisa diurai dan diberantas meski melibatkan banyak pihak. Dia menegaskan, setiap pelaku dalam jaringan mafia tanah harus dihukum berat-beratnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Tidak ada toleransi bagi mafia tanah perampas penghidupan orang. Tindakan mereka bisa membuat orang sengsara, maka hukum seberat-beratnya supaya mereka jera!” ungkapnya.

Lebih lanjut, Puan berharap Kementerian ATR/BPN menindak tegas apabila ada pegawainya yang terlibat dalam aksi mafia tanah. Sebab tak

sedikit kasus-kasus perampasan tanah yang melibatkan oknum pemerintah.

“Pecat apabila ada oknum Kementerian ATR/BPN yang terlibat dalam kasus mafia tanah. Banyaknya kasus pertanahan juga menunjukkan belum maksimalnya tertib administrasi dalam pengelolaan BPN sehingga harus mendapat atensi yang lebih lagi,” tegas politisi PDI-Perjuangan itu. ■ rmm/sf



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: Eno/nvl



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Darmayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval, Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus

FOTOGRAFER
Prima Danuritto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati, Rosnita

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito

PHOTOGRAFER ART
Friederick Munchen

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Isfandi Mulyana, Yudi Kresna, Hidayatulloh

ADMINISTRASI STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif Surachman, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Pimpinan BURT DPR RI saat memotong pita pembukaan Pameran Foto Jurnalistik Warna-Warni Parlemen X. Foto: Eot, Azka/mv

Sufmi Dasco Apresiasi Pameran Foto Jurnalistik Warna-Warni Parlemen X

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi Pameran Foto Jurnalistik Warna-Warni Parlemen X yang diselenggarakan oleh Biro Pemberitaan Parlemen yang bekerjasama dengan Koordinatariat Wartawan Parlemen (KWP). Menurutnya, selama ini kehadiran jurnalis menjadi mitra dalam mendukung setiap kegiatan kedewanan, baik itu kegiatan pengawasan, anggaran, legislasi.

Hal tersebut diungkapkan Dasco dalam sambutannya saat membuka ketika membuka kegiatan Pameran Foto Jurnalistik Warna-Warni Parlemen X, di Selsar Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, (23/11). Pameran ini mengangkat tema 'Bersatu Lawan Pandemi'.

"Dan di DPR ini ada warna-warni fraksi, yang kemudian dalam karya foto ada 100 karya foto berupa foto warna-warni tentang kegiatan-kegiatan Anggota DPR RI yang dibuat oleh kawan-kawan jurnalis foto," ujar Dasco

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu juga mengungkapkan, keistimewaan foto adalah gambarnya tidak pernah berubah, meskipun orang yang terekam dalam foto tersebut semakin hari makin berubah.

"Harapan saya bahwa kegiatan ini dengan tentunya dukungan dari BURT dan Kesetjengan akan terus berlangsung dari waktu ke waktu dengan karya-karya foto yang berwarna-warni dan selalu berubah dan juga kreativitas kawan-kawan kita dukung selalu agar dapat membuat warna DPR ini selalu

cerah," lanjut Dasco.

Diketahui, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI bekerjasama dengan Koordinatariat Wartawan Parlemen (KWP) menggelar kegiatan Pameran Foto Jurnalistik Warna Warni Parlemen X dengan tema Bersatu Lawan Pandemi. Pameran yang dilaksanakan 23-30 November 2021 ini menampilkan sebanyak 101 karya foto dari 20 pewarta foto yang tergabung dalam KWP maupun media internal DPR.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso, Wakil Ketua BURT Novita Wijayanti, Anggota Komisi IX DPR RI Sutan Adil Hendra, dan Wakil Ketua Pengurus Koordinatariat Wartawan Parlemen Carlos Kartika Yudha Path serta para pejabat di lingkungan setjen DPR RI. ■ hal.ts/es

Rachmat Gobel Berharap Pemerintah Perpanjang Program Diskon PPnBM



Wakil Ketua DPR RI Korinbang Rachmat Gobel saat mengunjungi GIIAS 2021 di BSD City. Foto: Azka/nvl

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel berharap pemerintah dapat memperpanjang kebijakan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) hingga tahun 2022 mendatang. Pasalnya, menurut politisi Partai NasDem itu, kebijakan relaksasi PPnBM memberikan dampak besar bagi geliat industri otomotif nasional.

“Terkait PPnBM, menurut saya pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang menuju (relaksasi) dan tentu kami akan menggiatkan industri otomotif untuk bisa tumbuh lagi terlebih pasca-pandemi Covid-19,” kata Gobel

di sela-sela kunjungannya ke pameran GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, di BSD City, Tangerang, Banten, Minggu (21/11).

”

JADI LANGKAH-LANGKAH DARI PADA PEMERINTAH HARUS DAPAT IKUT TERLIBAT, JADI BAGAIMANA HARUS IKUT MENDORONG DALAM INDUSTRI OTOMOTIF YANG INVESTASINYA SUDAH DARI DULU

Gobel menyebutkan industri otomotif menjadi barometer dari pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk lebih maju lagi. “Jadi langkah-langkah dari pada pemerintah harus dapat ikut terlibat, jadi bagaimana harus ikut mendorong dalam industri otomotif yang investasinya sudah dari dulu. DPR terus mendorong (PPnBM) dan juga inovasi-inovasi untuk mendorong pertumbuhan otomotif itu sendiri,” pungkas legislator dapi Gorontalo itu.

Sebagai informasi, dalam pagelaran otomotif ini sebanyak 21 merek kendaraan penumpang dan komersial, serta lebih dari 100 merek industri pendukung hadir di GIIAS 2021 untuk menampilkan produk-produk, teknologi, dan inovasi otomotif terkini. ■azk/sf

Komisi I Apresiasi Peran Aktif Binda Kalsel Tangani Pandemi

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono mengapresiasi kinerja dan aktif Badan

Intelijen Daerah (Binda) Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengatasi persoalan pandemi Covid-19 di Kalsel. Dirinya meyakini, pandemi Covid-19 ini belum usai, untuk itu butuh sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk menanganinya.

“Saya sangat mengapresiasi sangat gembira atas kinerja dan peran serta pelibatan Binda Kalsel di dalam mengatasi masalah pandemi Covid-19 yang berada di Provinsi Kalsel,” ucapnya usai pertemuan dengan Kabinda Kalsel Brigjen Pol Heri Armanto beserta jajaran Binda Kalsel, di Banjarmasin, Kalsel, Kamis (18/11).

Di sisi lain, Bambang juga memaparkan bahwasanya Komisi I ingin melihat upaya dan langkah-langkah BINDA Kalsel dalam mendeteksi dini pembakaran liar dan/atau penebangan liar (illegal logging) di kawasan hutan Kalsel. “Kalau kita melihat tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di Kalsel ini masih ada, namun di tahun 2021 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Artinya, aparat telah bekerja secara maksimal, meskipun

ada hal-hal yang perlu perbaikan dan penyempurnaan,” tandasnya.

Sementara Anggota Komisi I DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menyoroti perubahan iklim. Menurutnya, sudah waktunya seluruh warga menyadari bahwa krisis iklim atau *climate change* merupakan permasalahan yang berkategori *extraordinary*. Sehingga diperlukan kerja sama dan sinergi antar *stakeholder*, termasuk Binda Kalsel. Mengingat kerusakan alam yang terjadi di Kalimantan juga semakin besar.

“Perlu adanya kerja keras untuk mencegah kerusakan alam itu semakin besar. Dan di Kalimantan

yang menjadi paru-paru dunia, masih sangat marak sekali *illegal logging* atau kebakaran hutan. Kami menyerukan agar semua *stakeholder* termasuk BIN itu juga harus turun aktif di dalam mencegah hal itu terjadi sehingga kerusakan alam ini bisa dicegah ataupun justru alih-alih di perbaiki,” tegasnya.

Dirinya juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memiliki kesadaran untuk turut serta dalam menangani perubahan iklim tersebut. “Saya pikir Indonesia yang menjadi bagian dari warga dunia harus turut serta bahkan berperan sangat aktif dalam menjaga hutan, karena Indonesia menjadi paru-paru dunia,” tutupnya.

Turut hadir Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan dan Mukhlis Basri dari F-PDI Perjuangan, Christina Aryani (F-Golkar), Darizal Basir (F-Demokrat), dan Slamet Ariyadi (F-PAN). ■ ndy/es



Wakil Ketua
Komisi I DPR RI
Bambang Kristiono.
Foto: Nadya/nvl



Pertukaran cenderamata dan foto bersama Tim Kunspek Komisi I DPR RI dengan jajaran Balai Deteksi Sinyal (BDS) BSSN di Batam. Foto: Chasbi/nvl

Komisi I Apresiasi Kinerja Balai Deteksi Sinyal BSSN di Batam

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi Balai Deteksi Sinyal (BDS) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Batam yang menjadi benteng pertahanan keamanan siber di Indonesia. Kharis menilai BDS telah bekerja dengan baik mengingat, tantangan keamanan siber di Batam tidaklah ringan.

“Mereka (BDS) sudah bekerja dengan baik walaupun tantangannya juga tidak ringan. Mereka bekerja dalam sunyi. Tidak semua pekerjaan

BSSN bisa di-*publish*,” ujar Kharis usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi I DPR RI ke Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis (18/11).

Dalam kunjungan tersebut, Tim Kunspek Komisi I DPR RI berkesempatan meninjau fasilitas peralatan Kantor BDS Batam dan menyaksikan kegiatan *live demo* Tim Balai Deteksi Sinyal dan Tim National Security Operation Centre (NSOC) BSSN di ruang *command center*.

“Kami tercerahkan, bagaimana cara kerja teman-teman di BSSN tadi dipegang oleh SDM yang terdiri dari anak-anak muda. Saya kira memang

umur anak muda seperti itulah yang kami harapkan agar bisa menggawangi seluruh peralatan yang ada di BSSN,” tambah Kharis.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menerangkan, siber sangat erat kaitannya dengan teknologi, jadi harus ada *update* peralatan serta peningkatan kemampuan SDM-nya agar setara dengan yang ada di dunia. “Oleh karenanya saya berharap ke depan BSSN akan lebih tangguh lagi dengan dukungan peralatan yang tidak ketinggalan dari kemajuan teknologi,” harap legislator dapil Jateng V itu.

Di kesempatan yang sama, Kepala BSSN RI Hinsia Siburian mengucapkan terima kasih atas kunjungan kerja Komisi I DPR RI tersebut karena merupakan wujud perhatian untuk mengamankan dan meningkatkan keamanan ruang siber nasional di Indonesia.

“Kami sudah sampaikan kondisi yang terjadi di lapangan saat ini dan tentunya kami telah memberikan beberapa saran. Mudah-mudahan ke depan tugas dan fungsi Komisi I DPR RI bisa terus mendukung kemajuan untuk ruang siber negara kita,” tutup Hinsia. ■ cas/es

RUU Kejaksaan Sebagai Upaya Mantapkan Peran dan Kedudukan Kejaksaan

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia perlu mengatur berbagai poin yang diperlukan bagi Kejaksaan dalam memantapkan kedudukan dan perannya sebagai lembaga negara yang dapat menjalankan fungsi secara bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun.

Masukan dari berbagai pihak seperti Kejaksaan Tinggi di daerah, Kepolisian, *stakeholder* maupun sivitas akademika pun menjadi penting bagi perumusan RUU tersebut agar nantinya RUU Kejaksaan benar-benar menjadi produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Kejaksaan di Indonesia ke depannya.

“Dengan dikerjakannya RUU Kejaksaan ini, semakin ada perbaikan dan kemajuan di tubuh Kejaksaan Republik Indonesia,” tutur Adies saat memimpin pertemuan Panja RUU Kejaksaan Komisi III DPR RI dengan jajaran Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung di Kantor Kejati Babel, Bangka Tengah, Jumat (19/11).

Pada pertemuan tersebut, Adies memberi penekanan terkait beberapa poin penting yang kerap sering menjadi hambatan bagi Kejaksaan dalam menjalankan fungsi dan perannya. Di antaranya adalah terkait perlunya koordinasi lebih awal terkait penyidikan. Ia menyoroti rantai penyidikan atas kasus-kasus yang

ditangani Kejaksaan, menurutnya hal itu berbelit-belit dan menyita waktu.

“Perlu adanya koordinasi lebih awal terkait tentang penyidikan karena selama ini sering terjadi miskomunikasi dan bolak-baliknya perkara dari Kepolisian ke Kejaksaan kemudian kembali lagi, tidak bisa masuk ke tahap penuntutan. Inilah memang perlunya diatur rentang metode koordinasi yang baik. Supaya kasus-kasus yang ditangani tidak bolak-balik antara Kepolisian Kejaksaan sebelum masuk pada penuntutan,” terang Adies saat menanggapi masukan dari Kajati Babel I Made Suarnawan soal perlunya penyederhanaan proses penyidikan. ■ *srw/sf*



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir. Foto: Fitri/nvl

RUU Kejaksaan Perlu Atur Penegakan Hukum Syariat Islam di Aceh

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga perlu mengatur penegakan hukum Qanun Jinayat atau Syariat Islam yang berlaku di Provinsi Aceh.

“Kami ingin memastikan hal-hal yang terkait dengan tugas penegakan hukum Kejaksaan yang ada di Aceh juga mendapatkan pengaturan yang

memadai di dalam Undang-Undang Kejaksaan hasil revisi itu nanti,” jelas Arsul usai memimpin pertemuan Tim Panitia Kerja (Panja) RUU Kejaksaan Komisi III DPR RI dengan jajaran Kejaksaan Tinggi Aceh, di Banda Aceh, Kamis (18/11).

Arsul berharap ke depan tidak muncul lagi persoalan mengenai tugas penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan di Aceh. Hal ini mengingat Aceh menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang menerapkan Qanun Jinayat atau Hukum Syariat Islam. “Jadi jangan sampai nanti ada yang

Komisi III Apresiasi Capaian Vaksin Covid-19 di Kalsel



Foto bersama Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kapolda Kalsel. Foto: Kiki/nvl

Komisi III DPR RI mengapresiasi penanganan Covid-19 di Kalimantan Selatan (Kalsel). Dari total penduduk Kalsel sekitar 3.161.137 orang, capaian vaksinasi dosis pertama sebanyak 1.391.813 (44,03 persen) dan capaian dosis kedua sebanyak 885.697 (28,02 persen).

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul

Salah usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI bertemu dengan Kapolda Kalsel Irjen Rikwanto beserta jajaran dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel Rudi Prabowo Aji beserta jajaran, di Banjarmasin, Jumat (19/11).

“Dari paparan Pak Kapolda, dari penduduk Kalimantan Selatan 3,1 juta, dan alhamdulillah sudah mendapatkan vaksin 44 persen. Insya Allah nanti akan

mempersoalkan bahwa terkait tugas Kejaksaan dalam konteks penegakan hukum berbasis Qanun Syariah itu tidak ter-cover dalam Undang-Undang Kejaksaan,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Arsul menambahkan, dalam kunjungan ini Komisi III DPR RI juga hendak mengetahui pandangan Kejaksaan Tinggi mengenai beberapa isu dan aspek krusial yang ada pada lembaga negara tersebut, serta hal-hal yang perlu diakomodasi dalam pembahasan RUU Kejaksaan. “Tentu karena banyak hal yang di-cover RUU Kejaksaan, maka kami juga ingin bertanya tentang beberapa hal atau isu terkait RUU Kejaksaan, di antaranya seperti tugas intelijen yustisial dan pengaturan terkait status para jaksa sebagai aparatur negara,” imbuhnya. ■ rr/sf

ter-cover semua yang wajib vaksin, sebagaimana perintah Bapak Presiden bahwa akhir Desember 2021 kira-kira sudah 70 persen. Jadi Kalsel Insya Allah semua nanti bebas Covid lah,” harap Pangeran.

Tercapainya percepatan penanganan Covid-19 di Kalsel, kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, sebagai salah satu upaya Kepolisian, khususnya Polda Kalsel, dalam hal ini membantu mengawasi pelaksanaan dan pendistribusian vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

Senada, Anggota Komisi III DPR RI Acmad Dimiyati Natakusumah, mengapresiasi upaya pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, dan Polda Kalsel, dalam upaya mewujudkan percepatan penanganan Covid-19 di Kalsel. Menurut Dimiyati, peran aparat keamanan dalam melakukan pengawasan protokol kesehatan sangat penting. Karena masyarakat akan patuh apabila aparat keamanan yang terjun langsung dalam memantau masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan.

“Maka oleh sebab itu harus terus digalakkan. Masyarakat itu takut dengan Polisi, karena takut sehingga mereka betul-betul menjaga jarak, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan dan juga untuk hidup yang sehat. Polisi harus hadir walaupun ini tugas pemerintah, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka Polisi dan Jaksa serta TNI harus kolaborasi konstruktif untuk bagaimana menyukseskan penanganan Covid-19 termasuk vaksinasi. Kita berharap kalau bisa vaksinasi di seluruh Indonesia, masyarakat sudah tervaksinasi di akhir tahun 2021,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. ■ qq/sf



Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani. Foto: Rizki/nvl

Darori Wonodipuro Komitmen Dukung Pertumbuhan Ekonomi Kebumen



Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro. Foto: Eki/nvl

Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menyampaikan komitmennya dalam membantu pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. “Kenapa (Komisi IV DPR RI mendatangi) Kebumen, karena Kebumen merupakan daerah termiskin pertama di Jawa Tengah, dan kemiskinan ekstrem juga

termasuk Kebumen. Selain Banjarnegara, Banyumas, Brebes dan Pemalang,” terang Darori usai mengikuti rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (18/11). Tim Kunspek Komisi IV DPR RI diterima Bupati Kebumen beserta jajaran.

Meski menjadi daerah termiskin di Jateng, Darori menilai Kebumen memiliki potensi ekonomi. Hal itu menjadi kesimpulan setelah ia berdialog bersama petani klengkeng di Kecamatan Mirit. “Klengkeng yang selama ini kita dapat dari Thailand, ternyata lebih bagus klengkeng yang ada di kita dan tadi kami sudah mencoba,” ujar Darori.

Oleh karena itu, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu juga mendukung program pemerintah dalam menumbuhkan perekonomian Kebumen, salah satunya melalui pembangunan *shrimp estate* yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Dari sekian banyak daerah di Indonesia, alhamdulillah Kebumen diberi kepercayaan oleh Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ada *shrimp estate*, yaitu tambak udang modern yang ada di Pantai Petanahan seluas 100 hektare dengan biaya Rp250 miliar. Ini luar biasa,” apresiasi Darori. ■ eki/sf

Miliki Potensi Pangan, Pemanfaatan Lahan di Lampung Belum Maksimal



Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi. Foto: Tari/nvl

Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi mengatakan sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Indonesia masih banyak lahan di Sai Bumi Ruwa Jurai, Provinsi Lampung yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Hal itu ia nyatakan saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Kecamatan Jati Agung,

Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (18/11). Dwita menilai lahan di wilayah tersebut sangat cocok ditanami tanaman pangan seperti jagung, dengan perlakuan khusus berserta bantuan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP).

“Saat ini sangat baik untuk kita tanam jagung. Kita coba berkolaborasi dengan swasta dan BPTP untuk menanam jagung yang lahannya memang belum potensial, yang kemarin baru (menghasilkan) 3 ton, ternyata dengan perlakuan yang direkomendasikan (BPTP) itu bisa mencapai (hasil) 7 ton,” jelas politisi Partai Gerindra itu. ■ mri/sf

Infrastruktur Harus Dibangun Secara Sinergi

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw ingin pembangunan infrastruktur dibangun secara berkesinambungan. Seperti pembangunan pelabuhan maka harus ada akses jalan dan jembatan yang mendukung untuk transportasi. Kesinambungan pembangunan harus menjadi perhatian pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya.

Hal ini dia sampaikan saat memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI ke Provinsi Jambi, Jumat (19/11). Robert mengungkapkan pembangunan jembatan dan pelabuhan di kawasan Ujung Jabung mendesak untuk

diprioritaskan dalam waktu dekat.

“Jangan pelabuhan ada jalan tidak ada. Maka harus dibangun beriringan, sinergi kementerian harus ada dan harusnya kami yang bisa hubungkan itu, makanya kami hadir disini untuk satukan itu. Kami komit perjuangkan ini,” papar politisi Partai NasDem itu.

Pembangunan infrastruktur, menurut Robert, merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Ia mengatakan, pelabuhan Ujung Jabung nantinya bisa memberikan manfaat seperti tempat ekspor hasil bumi di Jambi. “Kalau lancar pasti angkat pendapatan daerah,” ucapnya.

”

KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG BAIK DAPAT MENJADI MESIN UTAMA PEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISTRIBUSI LOGISTIK, PENDORONG INVESTASI, SERTA PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

Robert mengungkapkan, pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung sangat strategis bagi masyarakat di Provinsi Jambi sebagai prasarana yang berperan penting untuk pengangkutan produk hasil pertanian, perkebunan, serta sumber daya mineral sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah setempat.

Untuk itu, ketersediaan infrastruktur yang baik dapat menjadi mesin utama pemacu pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik, pendorong investasi, serta pemerataan hasil pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Komisi V sangat mendukung pembangunan sarana prasarana infrastruktur dan transportasi terutama konektivitas darat dan laut. Pihaknya menyampaikan hasil tinjauan komisi V yang dihadiri fraksi lengkap ini kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan. Agar program ini kedepan dilakukan sinergi, baik pelabuhan maupun jalan. ■ eko/es



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw. Foto: Eko/nvl

Komisi V Dukung Tujuh Usulan Prioritas Pembangunan di Rembang

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhamad Arwani Thomafi mendukung tujuh dari 18 usulan pembangunan infrastruktur yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang untuk segera direalisasikan, dalam upaya implementasi Peraturan Presiden (PP) Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan. Menurut Arwani, pembangunan ini penting sebagai bagian dari upaya memaksimalkan jalur logistik perdagangan serta pelayanan publik masyarakat Rembang.

“Kita ketahui bahwa beberapa problem di Kabupaten Rembang. Pertama, tentang infrastruktur jalan. Di sini kita ketahui ada kurang lebih 60 kilometer jalur Pantura sebagai sarana pergerakan logistik yang utama di Pulau Jawa, perlu juga ada perhatian pemerintah pusat untuk terus peningkatan kapasitas,” tuturnya saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dengan Bupati Rembang serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Rembang, di Rembang, Jawa Tengah, Kamis (18/11).

Tujuh usulan prioritas pembangunan di Rembang tersebut meliputi, pembangunan jalan lingkar, pembangunan pasar induk, dan pembangunan embung. Kemudian, peningkatan eksploitasi sumber air semen, penerangan jalan umum (PJU), pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, hingga pembangunan pelabuhan di Rembang.

Politisi Partai Persatuan



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhamad Arwani Thomafi saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Komisi V DPR RI dengan Bupati Rembang serta jajaran SKPD Kabupaten Rembang. Foto: Prima/ivl

Pembangunan (PPP) tersebut juga mendukung peningkatan pelayanan publik dalam hal perdagangan, dimana renovasi Pasar Induk Rembang juga perlu dilakukan. “Dan juga Pasar Kota

”

INI MENJADI BAGIAN YANG PENTING UNTUK MENINGKATKAN SARANA DAN INFRASTRUKTUR, AGAR ADA PENINGKATAN PELAYANAN UNTUK PUBLIK

Rembang menjadi perhatian kita, sehingga hal ini menjadi bagian yang penting untuk meningkatkan sarana dan infrastruktur, agar ada peningkatan pelayanan untuk publik,” pungkas Arwani lebih lanjut.

Arwani juga menyoroti adanya ketersediaan air baku untuk masyarakat Rembang dengan memanfaatkan waduk yang sudah ada agar masyarakat rembang dan sekitarnya dapat dengan mudah memperoleh air baku untuk kehidupan sehari-hari. “Tujuh usulan dari Kabupaten Rembang ini kita dukung dan kita akan dorong menjadi prioritas pembangunan agar segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Arwani. ■ pdt/sf

Komisi V Dukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bengkulu Utara

preservasi jalan, karena memang jalan yang statusnya masih non-status rusak berat, *kasihan* juga masyarakat. Belum lagi jalan yang terkena abrasi. Dan untuk Kementerian Desa, untuk sesegera mungkin bisa menyelesaikan program kota terpadu dan mandiri,” tandas politisi PDI-Perjuangan itu.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bengkulu Utara Mian menjelaskan, permohonan kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Bengkulu Utara ini dilatarbelakangi oleh kondisi kekuatan fiskal daerah yang sangat terbatas, sementara beban kerja Pemerintah Kabupaten dengan rentang kendali yang begitu luas, dan keluhan-

Komisi V DPR RI mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau kondisi infrastruktur di sejumlah titik, mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) dan Kementerian Perhubungan untuk menyelesaikan berbagai program pembangunan di Bengkulu Utara.

“Dengan melihat secara langsung kondisi daerah yang seperti ini, banyak sekali kita lihat mulai dari adanya abrasi dan jalan yang rusak. Harapan kami tentunya dengan kehadiran kami di Kabupaten Bengkulu Utara ini bisa mempercepat terwujudnya program-program yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati. Ini merupakan satu aspirasi daerah yang sekaligus kami terima dari Anggota Komisi V maupun oleh mitra Komisi V,” kata Estu, sapaan akrab Sadarestuwati di Balai Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, Kamis (18/11).

Dalam kunjungan yang didampingi Bupati Bengkulu Utara Mian ini, Komisi V DPR RI meninjau lokasi terjadinya abrasi di Desa Tebing Kandang, Kecamatan



Komisi V DPR RI meninjau lokasi abrasi di Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Bengkulu Utara. Foto: Sofyan/mv

Air Napal dan di Desa Urai, Kecamatan Ketahun. Komisi V DPR RI juga meninjau sejumlah ruas jalan di Bengkulu Utara yang perlu mendapat perhatian, seperti banyaknya kerusakan badan jalan dan keberadaan jalan non-status yang tidak mendapat perawatan. Estu menambahkan, Bupati Bengkulu Utara menyampaikan masih ada jalan yang tidak bisa dilewati kendaraan saat hujan.

“Berkaitan status jalan dan pengembangan wilayah transmigrasi menjadi wilayah kota terpadu dan mandiri, ini tentunya harus kita *support* dari pusat. Saya minta Kementerian PUPR untuk menyelesaikan terkait status jalan. Kemudian untuk mempercepat

keluhan masyarakat atas pengalihan jalan yang semula berstatus jalan nasional menjadi jalan non-status.

“Kami mengucapkan terima kasih atas diresponnya (permohonan ini) menjadi program kunjungan Komisi V DPR RI ke Bengkulu Utara. Karena kita sadar, bahwa 2020, 2021, dan 2022 dalam kondisi Covid (dengan anggaran) yang sangat terbatas. Tetapi paling tidak kita berharap, di APBN-P 2022, dan APBN 2023, bisa menjadi program prioritas Bengkulu Utara yang dijamin Komisi V DPR RI, dalam tindak lanjut menyelesaikan permasalahan infrastruktur di Kabupaten Bengkulu Utara,” harap Mian kepada Komisi V DPR RI. ■ sf

Jelang Nataru, Stok Cadangan Beras Dipastikan Cukup

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyampaikan ketersediaan beras secara nasional aman hingga akhir tahun ini. Sebagaimana ketetapan pemerintah mewajibkan Bulog memiliki stok cadangan beras pemerintah antara 1 hingga 1,5 juta ton.

“(Cadangan beras) masih aman. Itu 1,5 sampai 2 juta ton untuk seluruh gudang secara nasional, itu untuk cadangan pangan kita,” ungkap Aria Bima usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau Gudang Perum Bulog Cirebon, di Kecamatan Kedawung, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (19/11).

Adapun cadangan tersebut terdiri dari cadangan pangan dari pemerintah yang anggarannya dari Menteri Perdagangan, cadangan beras komersial dan beras bantuan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Kendati stok aman, Aria Bima menilai penyaluran beras Bulog mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena kurangnya *outlet* penyaluran beras Bulog. “Sekarang masih bisa kita paham karena *cash flow*-nya Bulog bermain di beras komersial. Kalau cadangan pangan itu kan kendali Menteri Perdagangan,” terangnya.

Politisi PDI-Perjuangan itu pun mendorong agar Bulog tidak hanya melakukan penyerapan, namun juga dibarengi penyaluran yang optimal. “Nah ini yang harus dimengerti supaya perputaran beras ini jalan atau dicari orkestrasi lain di Badan Pangan Nasional. Bulog ini kan sekarang tidak jelas disuruh menyerap terus keluarnya kapan, kalau harus ke komersial persaingannya begitu ketat,” ujarnya.



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin Komisi VI meninjau Gudang Bulog Cirebon. Foto: Anne/nvl

Menurut Aria Bima, peran Bulog sebagai penyangga beras nasional dapat dipertegas kembali. “Saya kira Badan Pangan Nasional harus melihat secara komprehensif dalam rangka stabilisasi harga, distribusi pangan serta bagaimana peran bulog,” tandas legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Sebelumnya, Perum Bulog mencatat hingga saat ini telah menyerap sebanyak 1,24 juta ton beras atau masih dalam kisaran penugasan cadangan beras pemerintah yaitu 1 sampai dengan 1,5 juta ton. Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik, Mokhammad Suyamto mengatakan nantinya stok cadangan beras pemerintah ini akan digunakan untuk kegiatan operasi pasar guna mengantisipasi laju inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru.

“Stok ini akan kita maksimalkan untuk kegiatan operasi pasar di akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022, sambil kita akan kembali melakukan

penyerapan pada saat panen MP (masa panen) 1 tahun 2022,” katanya. Untuk kondisi Jabar, Suyamto mengatakan stok beras mencapai 190 ribu ton. Menurutnya, Bulog tidak dapat optimal menyerap gabah petani karena pemerintah menetapkan acuan pengamanan stok beras di kisaran 1 juta-1,5 juta ton. Artinya, bila Bulog menyerap lebih dari jumlah itu, maka perlu penyaluran rutin ke pasar.

“Sementara di sini adalah daerah produsen yang harganya itu masih sekitar HPP yaitu rentang Rp82.500-Rp83.500. Ini membuat pengeluaran kami tidak maksimal, sehingga stok menumpuk kami tidak bisa penyerapan optimal saat panen. Harapan kami, pada sisa waktu di bulan desember dan januari ini kita bisa melakukan operasi pasar maksimal sehingga penyerapan keluar dan pada saat panen bulan Maret kita bisa menyerap dengan maksimal,” tandas Suyamto. ■ ann/sf

Jelang Nataru, Komisi VI Pastikan Stok BBM Pertamina



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal. Foto: Anne/nvl

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengingatkan, agar kejadian kebakaran tangki penyimpanan BBM di Pertamina

RU IV Cilacap baru-baru ini tidak mengganggu distribusi BBM ke seluruh Indonesia. Selain itu ia berharap, Pertamina dapat menerapkan *safety standard* yang tinggi, mengingat kejadian serupa seringkali terjadi.

“Nah dengan kapasitas yang ada, alhamdulillah di Banten untuk stok BBM ini kelihatannya aman dan tidak ada kendala. Namun kita ingin ingatkan kepada mereka (Pertamina) supaya *safety standard*-nya tinggi. Jangan sampai kejadian (kebakaran) kembali, karena (kebakaran tangki BBM) ini sudah beberapa kali kejadian. Itu

kan pasti mengganggu distribusi BBM ke seluruh Indonesia,” jelas Hekal saat memimpin pertemuan tim kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI dengan direksi PT Pertamina Patra Niaga, di Cilegon, Banten, Jumat (19/11).

Di sisi lain, politisi Partai Gerindra tersebut berharap masyarakat Indonesia dapat menjaga stabilitas dalam menghadapi pandemi. Ia meminta masyarakat untuk menunggu keputusan pemerintah terkait mudik Nataru.

“Jangan sampai kita sudah kena penyakit wabah Covid, (yang) ini sudah meresahkan masyarakat, ditambah lagi masalah kinerja BUMN kita yang meresahkan ataupun mitranya yang tidak profesional,” tandas Hekal sembari meminta agar Pertamina dan mitra swasta mempertimbangkan tarif BBM supaya *market friendly*. ■ hal/sf

Komisi VI Nilai Kehadiran Jamkrindo jadi Solusi Bagi Pelaku UMKM

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting di Indonesia dan berkontribusi cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Tanah Air. Bahkan, UMKM terbukti mampu bertahan dari krisis yang tiba-tiba datang, serta mampu menekan tingkat pengangguran. Namun saat ini, pelaku UMKM masih berkutut dengan masalah yang sama, yakni kerap dinilai tidak mampu memenuhi syarat perbankan (bankable).

Padahal secara keuntungan, banyak UMKM memiliki usaha yang layak diberikan akses perbankan (feasible). Dengan adanya persoalan tersebut, mengakibatkan tidak semua UMKM mampu mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menanggapi

hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta menilai hadirnya PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) bisa menjadi solusi bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan modal melalui KUR.

“Saya rasa (kehadiran Jamkrindo) ini menjadi jalan keluar yang baik (bagi pelaku UMKM) dan saya nilai ini sangat luar biasa,” kata Nyoman Parta usai memimpin pertemuan Kunspek Komisi VI DPR RI dengan Asisten Deputi Jasa Asuransi Dana Pensiun Anindita Eka Wibisono, Direktur Utama PT Jamkrindo Putrama Wahyu Setyawan, Direktur Keuangan Investasi dan MR PT Jamkrindo I. Rusdonbanu, dan Sekretaris Daerah Lombok Barat Agus Gumawan, di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (19/11).

Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan jika dilihat dari fungsi dan



Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta. Foto: Anne/nvl

programnya yang sangat baik, DPR akan ikut mensosialisasikan program tersebut. “Saya akan mendorong terus PT Jamkrindo agar capaian yang ditargetkan makin luas dan makin banyak berfungsi untuk UMKM kita. Yang diharapkan, Jamkrindo bisa lebih memberikan sosialisasi sekaligus juga pendampingan guna menghasilkan apa yang dibutuhkan masyarakat,” jelas Nyoman Parta. ■ rni/sf

Komisi VIII Apresiasi IAIN Bukittinggi



Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan kepada IAIN Bukittinggi. Foto: Kresno/nvl

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengapresiasi keberadaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, di Sumatera Barat, terutama terkait lingkungan dan lokasi kampusnya. Dikatakannya, IAIN Bukittinggi berada di lokasi yang strategis dengan pemandangan alam yang indah, yaitu di antara Gunung Marapi dan Singgalang.

“Saya rasa kalau kuliah di (IAIN Bukittinggi) sini tidak berasa kuliah, tapi liburan,” ujar Diah saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat Helmi, Rektor IAIN Bukittinggi beserta jajaran di ruang aula pertemuan IAIN Bukittinggi, Sumbar, Rabu (17/11).

Dalam kesempatan itu, Komisi VIII DPR RI memantau implementasi pembelajaran tatap muka di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Diah juga menyampaikan, Komisi VIII DPR RI akan

Komisi VIII Apresiasi Program Perlindungan dan Bansos di Parepare

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily mengapresiasi implementasi program perlindungan dan bantuan sosial melalui Kementerian Sosial di Kota Parepare. Menurutnya, program tersebut berjalan baik di Kota Parepare berkat peran aktif Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare di dalam berbagai program bantuan perlindungan sosial.

“Terlihat dari berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Program Kartu Sembako, serta program lainnya di Kota Parepare ini telah berjalan dengan baik,” ungkap Ace usai memimpin



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily menyalurkan bantuan kepada masyarakat Kota Parepare. Foto: Tiara/nvl

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI tentang Pengawasan Program Perlindungan Bantuan Sosial di

Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Rabu (17/11).

Di samping itu, politisi Partai Golkar tersebut turut mengapresiasi Pemkot Parepare yang telah mampu menangani pandemi Covid-19 dengan sangat baik. Meski demikian dirinya mengimbau

masyarakat Parepare untuk tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktifitas.

memperjuangkan IAIN Bukittinggi untuk meningkatkan statusnya menjadi UIN seperti yang diharapkan pihak rektorat.

Rektor IAIN, DR. Ridha Ahida menjelaskan, selama pandemi proses perkuliahan di IAIN Bukittinggi dilakukan secara *online*. Kini pandemi mereda, perkuliahan tatap muka mulai dilakukan, khususnya untuk pasca sarjana dan mahasiswa yang berdomisili di Sumbar. Namun demikian, ulas Rektor IAIN, masalah protokol kesehatan tetap menjadi perhatian utama.

Perkuliahan dengan menerapkan prokes ketat, selain memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, mahasiswa juga harus sudah divaksin. Ridha juga sempat memaparkan tentang perkembangan IAIN Bukittinggi yang, menurutnya sudah saatnya ditingkatkan status menjadi universitas. Terkait hal itu, Ridha pun menyerahkan proposal untuk pengembangan perguruan tinggi itu kepada Komisi VIII DPR RI. ■ eno/sf

Lebih lanjut, Ace berharap tercipta peningkatan sinergi antara pemkot dengan pemerintah pusat dalam berbagai program perlindungan dan bantuan sosial. Menurutnya, banyaknya program dari pemerintah pusat akan berhasil jika didukung dengan sinergi antara pemkot, khususnya dalam aspek kebutuhan data alokasi anggaran dan jumlah penerima Program Perlindungan dan Bantuan Sosial.

“Data penerima manfaat itu harus bersumber dari pemda. Kalau pemerintah pusat kan hanya bisa ‘memotretnya’ dari atas, sementara data yang objektif, faktual, tepat sasaran atau tidaknya itu ada pada pemda. Komisi VIII sekali lagi mengapresiasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh Pemkot Parepare, patut dicontoh oleh daerah lain sehingga penanganan Covid, pemulihan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat bisa kita capai bersama-sama,” imbuh legislator dapil Jabar II itu. ■ tra/es



Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan kepada penyandang disabilitas di Kebumen. Foto: Azka/nvl

Kebumen Perlu Perhatian Khusus untuk Tingkatkan Ekonomi Masyarakatnya

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan kepada penyandang disabilitas berupa sepeda motor roda tiga, dan kursi roda, serta pemberian uang tunai bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Rabu (17/11). Bantuan ini merupakan program Layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Penyandang Disabilitas yang merupakan program Kementerian Sosial dan bantuan BNPB.

Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengatakan, Kebumen memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat, karena masuk dalam daerah termiskin di tingkat nasional. Untuk itu ia meminta kolaborasi pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk bisa memberikan program-program bantuan kewirausahaan atau UMKM kepada masyarakat

di Kebumen untuk pengentasan kemiskinan.

“Masih banyak masyarakat yang membutuhkan (bantuan). Oleh sebab itu Pemda dan Pemerintah terkait bisa saling bersinergi untuk mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut. Bisa dengan program-program kewirausahaan, pelatihan kewirausahaan, dan permodalan masyarakat untuk usaha,” kata Wachid di sela-sela penyerahan bantuan, di Kantor Bupati Kebumen, yang didampingi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen, perwakilan Kementerian Sosial, Kementerian Agama dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Politisi dapil Jawa Tengah II ini menambahkan, bantuan-bantuan dari pemerintah pusat juga dinilai masih kurang.” Untuk itu, hasil dari kunjungan spesifik ini akan kami bawa ke DPR RI untuk disampaikan dalam rapat kepada kementerian terkait,” komitmen politisi Partai Gerindra tersebut. ■ azk/sf

RUU HKPD Diharapkan Mampu Tingkatkan Kemandirian Daerah



Foto bersama Tim Kunspek Komisi XI DPR RI di Kabupaten Badung, Bali. Foto: Devi/nvl

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan, Rancangan Undang-Undang Hubungan

Kuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) mengatur secara komprehensif mengenai beberapa hal, antara lain peningkatan *local taxing power*, penyesuaian objek pajak daerah, pemberian opsi retribusi tambahan, pemberian insentif bagi pelaku usaha ultra mikro, reformulasi transfer ke daerah yang lebih berkeadilan, sekaligus akan memuat pengaturan yang menjembatani sinergi kebijakan fiskal pusat dengan fiskal daerah.

RUU HKPD ini diharapkan dapat semakin mengurangi ketimpangan baik secara vertikal maupun horizontal, mampu meningkatkan kemandirian daerah, serta yang utama adalah dapat memberikan perbaikan yang signifikan terhadap pemerataan pelayanan publik yang memadai dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Dito dalam kunjungan kerja spesifik

Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Kamis (18/11).



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari. Foto: Novel/nvl

Dito menyatakan, Komisi XI DPR RI memandang perlu melakukan penjarangan masukan dari seluruh pemangku kepentingan khususnya dari pemerintah daerah dan akademisi untuk lebih menyempurnakan pengaturan dalam RUU HKPD.

“Kita sudah melakukan sosialisasi dan pembahasan RUU HKPD ini di beberapa daerah. Dan kita akan berkoordinasi lagi untuk menyelesaikan semua aspirasi dan masukan-masukan daerah terkait dengan Undang-Undang HKPD,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Dikatakannya, kebijakan desentralisasi fiskal menjadi alat pendanaan dalam penyelenggaraan fungsi dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan tetap menjaga keselarasan dan kesinambungan fiskal nasional melalui implementasi UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. ■ dep/es

Komisi XI Serap Aspirasi RUU HKPD di Bali

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari menuturkan, salah satu pilar dalam kebijakan Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) ialah harmonisasi belanja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hatari mengungkapkan hal tersebut saat memimpin Komisi XI DPR RI menyerap aspirasi maupun

RUU HKPD Didesain untuk Hilangkan Disparitas Daerah Kaya dan Miskin



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi XI DPR RI ke Bali. Foto: Jaka/nvl

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan mengatakan, desain besar Rancangan Undang-undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah (HKPD) adalah untuk menghilangkan disparitas antara daerah yang kaya dan miskin. Pasalnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibangun atas dasar keadilan dan kesamaan, sehingga

masukannya terkait RUU HKPD dengan perwakilan Kementerian Keuangan, Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Bali, serta Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Nusa Tenggara Timur (NTT) di Gianyar, Bali, Kamis (18/11).

“Bahwa konseptual rancangan undang-undang ini adalah harmonisasi belanja daerah antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi harus dirumuskan bahasa undang-undang yang fleksibel dan terutama harapannya pemerataan (kesejahteraan di daerah), (dan) kesenjangan (antar daerah) jangan terlalu mencolok, tentu itu berdasarkan data dari masing-masing daerah,” kata Hatari dalam sambutannya.

Perlu diketahui, RUU HKPD didesain untuk mendorong upaya pengalokasian sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan,

akuntabel dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.

Politisi Partai NasDem ini juga menanggapi aspirasi dari Wakil Gubernur Flores Timur yang meminta agar formula Dana Alokasi Umum (DAU) mempertimbangkan luas laut dalam variabel luas wilayah di daerah NTT sebagai komponen kebutuhan fiskal daerah.

“Memang ketimpangan antar daerah masih terjadi, daerah (Indonesia) timur karena jumlah penduduk tidak sebanyak penduduk di Jawa yang potensi ekonominya juga besar, jadi yang wilayah timur jangan cemburu. Pemerintah pusat dengan segala kearifan (kebijaksanaan) akan memperbaiki itu,” tutup Hatari. ■ nvl/sf

daerah yang pertumbuhan ekonominya bagus bisa berbagi ke daerah yang pertumbuhannya masih minim.

“Oleh karena itu, komposisi saling membantu mulai dari pemerintah pusat, antar provinsi dan kabupaten/kota akan kita rumuskan dalam tim khusus dan panja Komisi XI DPR RI. Kondisi saat ini, misalnya daerah Provinsi Kaltim, Kabupaten Kutai Kartanegara itu pertumbuhan ekonominya kan besar, tapi kalau kita lihat Provinsi NTT dan Kabupaten Maumere itu pertumbuhan ekonominya rendah, RUU HKPD memang diformulasikan untuk mengatasi masalah itu” ujar Fathan saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi XI DPR RI dengan mitra kerja terkait di Bali, Kamis (18/11).

Pertemuan tersebut dihadiri Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Wakil Wali Kota Denpasar, Bupati Kabupaten Klungkung, Bupati Kabupaten Tabanan, dan DPRD Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung dan Tabanan.

Legislator dapil Jawa Tengah II ini mencontohkan, Bali sangat bergantung dari pariwisata, secara otomatis akan sangat terdampak pandemi. Untuk itu, Pemda Bali meminta ada kebijakan pajak secara bijaksana untuk tempat wisata, penginapan dan sebagainya.

“Tentu kalau kita tidak hati-hati, akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi pertumbuhan ekonomi di Bali. Jadi teman-teman DPRD Bali juga meminta formula perhitungan yang pas untuk itu. Pasti kita akan rumuskan bersama untuk daerah yang bergantung pada pariwisata dan juga kondisi daerah lain. Kita harapkan RUU HKPD ini bisa memberikan suatu landasan bagus bagi daerah untuk tumbuh dan berkembang dengan APBD mereka masing-masing,” harap Fathan. ■ jk/es

Dukung Parlemen Modern, Arsip DPR Kuatkan Kinerja Dewan

DPR RI kini sedang bertransformasi menjadi parlemen modern di dalam demokrasi tanah air. Berada di dalam lembaga yang dinamis baik dari sisi internal maupun eksternal, Bagian Arsip Sekretariat Jenderal DPR RI konsisten melaksanakan kegiatan pemuktahiran kearsipan harus demi mewujudkan penguatan keterwakilan rakyat, keterbukaan informasi publik, dan penggunaan teknologi informasi komunikasi.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti mengungkapkan hal tersebut saat membuka diskusi 'Penyelamatan dan Pelestarian Arsip DPR RI' di Jakarta Selatan, Jumat (18/11). Turut hadir Sekjen DPR RI, Kepala ANRI,

dan Komunitas Historia Indonesia. Kearsipan di lingkungan DPR RI harus mengupayakan inovasi baik dari cara penyimpanan, perawatan, hingga pemanfaatan teknologi.

"Kami ingin kualitas pengelolaan kearsipan DPR RI selalu ditingkatkan. Kearsipan butuh pembaharuan dan inovasi, baik dari cara penyimpanan, perawatan, hingga pemanfaatan teknologi. Hal ini dimaksudkan, agar peran arsip sebagai pemersatu dan pembaharu bangsa dapat terus diaktualisasikan," tutur politisi Partai Gerindra itu.

Di tengah berbagai tuntutan untuk bekerja lebih baik, Novita mengapresiasi Arsip Setjen DPR RI yang selalu berupaya beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Ke

depannya, ia berharap Arsip Setjen DPR RI tidak berhenti meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan di lingkungan DPR RI yang profesional dan taat asas.

"Saya sangat mendukung tata kelola kearsipan DPR RI yang secara profesional dan taat asas. Tata kelola kearsipan mengenai data dan informasi terkait kinerja DPR RI, merupakan hal yang harus terus dijaga dalam upaya menguatkan memori kolektif bangsa mengenai kinerja Dewan." tutup Anggota Komisi V DPR RI tersebut lebih lanjut.

Sebagai informasi, rangkaian kegiatan Penyelamatan dan Pelestarian Arsip DPR RI dengan tema "Ada Bukti Dan Sejarah Kinerja Dewan di Kearsipan DPR RI" ini dilaksanakan sebagai bentuk konsistensi Bagian Arsip Setjen DPR RI dalam menjalankan regulasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan arsip di lingkungan DPR RI.

Dalam upaya menjalankan perannya, Arsip Setjen DPR RI berusaha andil menguatkan memori kolektif bangsa terhadap kinerja Dewan. Oleh karena itu, penyelamatan dan pelestarian arsip DPR RI secara berkala dilaksanakan demi menjaga arsip yang valid dan autentik guna pengambilan keputusan yang lebih baik di masa mendatang. ■ ts/sf



Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti menerima piagam penghargaan untuk Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai pengolah arsip terbaik. Foto: Saum/nvl



DPR Dukung Pembangunan Satu Data Nasional

DPR RI terus mendukung pembangunan satu data nasional seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kepala Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI Inosentius Samsul mengatakan, DPR sendiri sedang membangun *Big Data* yang secara institusional berisi data seputar kelembagaan DPR. *Big Data* ini akan menjadi sub sistem menuju satu data seperti yang diamanatkan Perpres tersebut.

Demikian disampaikan Sensi, sapaan akrabnya, saat dimintai komentarnya soal satu data nasional, usia mengikuti pertemuan di Telkom University (Tel-U), Bandung, Jawa Barat, Senin (22/11). Pembangunan satu data nasional sudah jadi keputusan politik. Dalam satu data itu, juga terdapat penyederhanaan sistem data. Sensi mencontohkan, NIK dalam KTP nanti bisa diakses dengan mudah dan berisi data pribadi penduduk, termasuk NPWP yang bersangkutan.

“Sudah jelas ada Perpres-nya yang berlaku secara nasional. Itu sudah jadi kebijakan dan keputusan politik untuk menciptakan satu data. Contoh, KTP sudah di-*insert* menjadi NPWP. Itu bagian dari penyederhanaan sistem data. Jadi nanti tinggal melihat NIK saja. Itulah upaya untuk menyederhanakan sistem data kita. Dan DPR menjadi sub sistem yang mengarah ke sana. Kita sendiri lebih pada level institusional DPR melalui *Big Data* yang isinya satu data mengenai DPR,” ungkap Sensi.

Sementara ketika ditanya soal wacana peningkatan status Perpres

Nomor 39 Tahun 2019 menjadi undang-undang (UU), Sensi berpendapat, Perpres tersebut akan bersetujuan dengan dua UU, yaitu UU Perlindungan Data Pribadi dan UU Ketahanan dan Keamanan Siber. Secara politis sudah ada permintaan dari para Anggota DPR untuk meningkatkan status Perpres tersebut. Tinggal melihat bagaimana

perkembangan ke depan, bisakah menjadi UU dan bersanding dengan dua UU yang sudah ada.

“Ada permintaan dari anggota DPR untuk memperkuat statusnya menjadi UU. Saya katakan, UU ini nanti terkait dengan UU lain. Misalnya, UU tentang Perlindungan Data Pribadi dan UU Ketahanan dan Keamanan Siber. Itu satu paket. Ketika kita bicara satu data, maka pada saat yang sama kita harus melindungi perlindungan data yang ada di situ dan sistem keamanan datanya,” tutup Sensi. ■ mh/sf



Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul.
Foto: Husen/nvl

Apresiasi dan Catatan BURT DPR untuk Layanan Joumpa dan Angkasa Pura



Wakil Ketua BURT DPR RI HA. Bakri HM bertukar cenderamata usai memimpin kunjungan kerja BURT DPR RI ke Bandara Internasional Minangkabau, di Padang. Foto: Ayu/nvl

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI.

Bakri mengapresiasi pelayanan yang diberikan oleh Joumpa Airport VIP Service kepada para anggota dewan yang menggunakan jasa transportasi bandara, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

“Sebagai mitra kerja DPR RI, khususnya BURT, Joumpa dan Angkasa pura telah memberikan pelayanan yang baik bagi Anggota DPR yang datang, maupun yang tinggal di Sumatera Barat itu sendiri. Oleh karena itu saya mengapresiasi semua itu,” ujar Bakri dalam kunjungan kerja BURT DPR RI ke

Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Sumatera Barat, Sabtu (20/11).

Meski demikian dalam kesempatan itu Bakri juga berharap agar Bandara Minangkabau yang notabene merupakan bandara Internasional, bisa melayani penerbangan dari dan ke luar negeri. Sehingga jika ingin melakukan perjalanan dari atau ke luar negeri, Anggota DPR yang bermukim di Sumbang, serta masyarakat umum tidak perlu terlebih dahulu ke daerah lain.

Selain itu politisi PAN ini juga berharap agar Joumpa lebih aktif lagi memperkenalkan diri atau mensosialisasikan diri atas pelayanannya ke anggota DPR yang

berada di dapil (daerah pemilihan) Sumatera Barat. Pasalnya tidak sedikit Anggota DPR yang belum tahu akan kerja sama DPR dengan Joumpa, dan fasilitas pelayanan Joumpa.

“Oleh karena itu saya berharap Joumpa-lah yang harus lebih aktif mensosialisasikan ke Anggota DPR RI tersebut. Atau dengan kata lain menjemput bola. Sehingga pelayanan yang diberikan BURT melalui Joumpa itu dapat bermanfaat dengan baik (bagi Anggota DPR RI),” pungkash Bakri yang diamini oleh Anggota BURT DPR RI yang ikut dalam kunjungan tersebut, di antaranya Tina Nur Alam dan Paramitha Widya Kusuma. ■ ayu/es

DPR Sangat Membutuhkan Peran Media

Peran strategis media massa sangat dibutuhkan DPR RI untuk menginformasikan kinerja dan capaian positif para anggota parlemen. Tiga isu penting yang sedang dibangun DPR juga diharapkan bisa tersampaikan ke publik lewat pemberitaan media massa.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan ini saat memberi sambutan pada acara slaturahmi dan perkenalan Kepala Biro Pemberitaan Parlemen yang baru Indra Pahlevi dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), Jumat (19/11). Tiga isu penting yang dibangun DPR itu, kata Indra, adalah transparansi, teknologi informasi, dan fungsi representasi.

“Untuk mencapai ketiga indikator tersebut, tidak bisa dipungkiri DPR sangat membutuhkan peran media atau wartawan. Seperti kita ketahui

pemberitaan media massa masih jadi referensi utama masyarakat dalam mengakses informasi terkait kegiatan parlemen,” ucap Indra. Wartawan, diakuinya, punya peran penting menyampaikan fungsi dan kegiatan DPR kepada publik.

Lebih lanjut Indra menjelaskan tiga isu penting yang terus dibangunnya itu. Pertama, transparansi yang ditujukan

untuk kemudahan mengakses informasi tentang semua alat kelengkapan dewan. Kedua, teknologi informasi untuk membuka semua akses bagi masyarakat memperoleh informasi melalui website, media sosia, dan lain-lain tentang DPR. Dan ketiga, fungsi representasi, yaitu sebagai lembaga perwakilan yang memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Silaturahmi ini diharapkan dapat memperkuat parlemen sebagai parlemen modern. Fokus utama parlemen modern adalah penggunaan teknologi informasi, keterbukaan akses informasi, dan fungsi representasi. KWP adalah wadah utama dalam mendukung kinerja DPR untuk mewujudkan tiga fokus utama melalui kolaborasi dengan Biro Pemberitaan Parlemen dan Setjen DPR sebagai fasilitator,” tambah Indra.

■ mh/es



**FOKUS UTAMA
PARLEMEN MODERN
ADALAH PENGGUNAAN
TEKNOLOGI INFORMASI,
KETERBUKAAN AKSES
INFORMASI, DAN FUNGSI
REPRESENTASI**



Foto bersama Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan jajaran pejabat Setjen DPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen. Foto: Arief/nvl



Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus memimpin rapat pergantian Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, dari Herman Hery menjadi Bambang Wuryanto di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (22/11). Foto: Jaka/nvl



Anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti menerima penyematan sebagai duta donor darah DPR RI saat kegiatan Donor Darah oleh Korpri Sekretariat Jenderal DPR RI dan PMI, di selasar Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, (24/11). Foto: Jaka/nvl



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat membuka acara HUT KORPRI Setjen DPR RI ke-50 di Lapangan Jantung Sehat DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/11). Foto: Gerald/nvl

